

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja merupakan sebuah hasil kerja dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Kinerja yang baik akan dapat membantu manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. Semakin tinggi kinerja perusahaan, maka akan semakin baik pula nilai perusahaan di mata investor. Salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan pada saat ini maupun prospek usaha yang akan datang adalah dengan cara menganalisis laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi (Al'akbar, 2016).

Laporan keuangan menjadi alat utama bagi perusahaan untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen dalam penyampaian informasi laporan keuangan tersebut perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak eksternal maupun internal yang kurang memiliki wewenang untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari sumber langsung perusahaan. Seperti dinyatakan dalam kerangka konseptual *Financial Accounting Standards Board* (FASB) bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk keputusan bisnis.

Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui

mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Fahmi, 2011:12).

Penilaian kinerja pada perusahaan yang akan menjadi sasaran investasi penting dijadikan sumber informasi untuk mengetahui kemampuannya menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Investor menilai, semakin tinggi kinerja keuangan perusahaan maka semakin baik pula *return* yang diperoleh oleh investor jika menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut (Lybryanta, *et al.*, (2015:7). Dalam hal ini untuk menilai kinerja keuangan dapat dilihat melalui rasio profitabilitas. Penentuan keputusan yang dilakukan oleh investor cenderung menggunakan rasio profitabilitas, karena rasio profitabilitas mampu menunjukkan seberapa besar nantinya keuntungan yang akan didapat dari investasinya. Rasio profitabilitas yang dijadikan acuan pengambilan keputusan untuk investasi oleh investor adalah *Return On Equity* (ROE) (Puniyasa dan Triaryati, 2016), karena ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dari sisi ekuitas, yang tersedia bagi pemegang sahamnya (Kasmir, 2012:204), sehingga menggambarkan seberapa besar pengembalian yang didapatkan investor ketika menanamkan modalnya di dalam perusahaan tersebut. Dengan demikian nilai ROE yang tinggi berarti terjadi kenaikan laba bersih, hal ini mencerminkan bahwa perusahaan mempunyai kinerja manajemen semakin baik sehingga laba bersih dapat meningkat, dengan hal

tersebut akan menarik para investor untuk mau menanamkan modalnya di perusahaan (Puniyasa dan Triaryati, 2016).

Corporate Governance adalah suatu rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *corporate governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama.

Penerapan *good corporate governance* diharapkan mampu menjadi alat untuk menjaga hubungan antara manajemen perusahaan, para investor, serta *stakeholders* lainnya, dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, serta dapat mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri yang berkaitan dengan *agency conflict* (Hapsari, 2011). Penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan sangat penting artinya karena secara langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi perusahaan di dalam pengambilan keputusan secara lebih bertanggungjawab dan pengambilan keputusan secara professional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan kepercayaan dari investor.

Namun penerapan *Corporate Governance* di Indonesia dianggap masih lemah, karena perusahaan-perusahaan di Indonesia masih belum mampu melaksanakan *corporate governance* dengan sungguh-sungguh

sehingga perusahaan belum mampu mewujudkan prinsip-prinsip *corporate governance* dengan baik.

Lemahnya penerapan *Corporate Governance* pada perusahaan perbankan ini juga dapat dilihat dari masih maraknya terjadi skandal keuangan kasus penipuan, pembobolan, korupsi yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri sampai tindakan pencucian yang sangat bertentangan dengan prinsip *corporate governance*. Jika pemerintah BI kurang tegas dalam menyelesaikan masalah ini, bukan tidak mungkin perusahaan akan mengalami dampak negatif pada sektor rill. Seperti contohnya kasus yang paling segar yaitu kasus Bank Century yang terjadi pada tahun 2008, terkait dengan terjadinya penipuan oleh manajemen yang menggelapkan uang nasabah dengan jumlah besar, penyalahgunaan wewenang oleh petinggi Bank Century dengan mencairkan dana deposito tanpa sepengetahuan pemilik dana hingga pencairan dana kredit kepada pihak lain yang menyalahi prosedur peraturan yang berlaku (Hartono dan Nugrahanti, 2014). Kasus tersebut merupakan tanda bahwa di Indonesia sampai saat ini penerapan *corporate governance* masih kurang baik. Kasus tersebut juga mengindikasikan bahwa masih terdapat masalah agensi di dalam perusahaan.

Pengelolaan bank di Indonesia tidak terlepas dari teori keagenan (*agency teory*). Teori keagenan menekankan petingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Pihak manajer (tenaga profesional) sebagai pengelola perusahaan

mempunyai tujuan yang berbeda dengan pemegang saham terutama dalam hal peningkatan prestasi individu dan kompensasi yang akan diterima.

Tabel 1.1
Perkembangan Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018

Tahun	Rata-Rata Kinerja Keuangan (ROE) Y	
	Nilai	+ / -
2015	163,95	-30,6%
2016	43,81	-73,28%
2017	-137,19	-413,15%
2018	169,53	-224%

Sumber: Bursa Efek Indonesia, (2021)

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata ROE pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga periode yaitu tahun 2016-2018 berfluktuasi setelah naik turun dimana pada tahun 2016 mengalami peningkatan 73,28% dari tahun 2015, tahun 2017 mengalami peningkatan 413,15% dari tahun 2016, dan tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 224% dari tahun 2017. *Return On Equity* (ROE) ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Fenomena naik turunnya kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 disebabkan karena kurangnya kemampuan perusahaan dalam menggunakan ekuitas dan seluruh asset untuk menghasilkan laba bersih perusahaan.

Salah satu faktor yang dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan perbankan adalah terjadinya konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Menurut Kurniawan dan Indriantoro (2000), pengelolaan perusahaan di Indonesia yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dinilai belum efektif, karena struktur kepemilikan yang didominasi oleh keluarga, sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara kepemilikan dan pengaturan perusahaan, menyebabkan manajemen perusahaan cenderung berpihak pada salah satu pemilik saja. Keadaan ini akan menimbulkan terjadinya konflik keagenan, sehingga berdampak buruk bagi kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik akan memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang diterjemahkan sebagai memaksimalkan harga saham (Sartono, 2010:xxi). Pada saat menjalankan perusahaan, manajer seharusnya memperhatikan kepentingan pemilik, yaitu mementingkan kemakmurannya sendiri, sehingga manajer seringkali bertindak tidak sejalan dengan kepentingan pemilik. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham menimbulkan terjadinya masalah yang disebut masalah keagenan (*agency conflict*). Menurut Brigham dan Houston (2010:26), konflik keagenan yaitu konflik kepentingan yang potensial antara agen (manajer) dan pemegang saham pihak luar atau kreditur (pemberi hutang).

Agency problem potensial untuk terjadi dalam perusahaan dimana manajer memiliki kurang dari seratus persen saham perusahaan (Sartono, 2010:xxi). Sering terjadi pada perusahaan besar yang memiliki proporsi

kepemilikan saham oleh manajer yang relatif kecil. Salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya konflik keagenan adalah melalui kepemilikan saham. Kepemilikan saham oleh pemegang saham internal dan pemegang saham eksternal, pemegang saham internal adalah orang yang memiliki saham di dalam struktur organisasi perusahaan sebagai pelaksana (manajer). Pemegang saham eksternal adalah orang yang memiliki saham yang tidak termasuk dalam struktur organisasi perusahaan hanya berperan sebagai pemilik seperti institusi atau perusahaan lain.

Kepemilikan saham diharapkan dapat menyatukan kepentingan antara pemilik dan pengelola perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya konflik keagenan. Menurut Pujiati dan Widanar (2009), berdasarkan atas proporsi saham yang dimiliki dalam suatu perusahaan, struktur kepemilikan dikelompokkan menjadi: kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Pujiati dan Widanar, 2009). Pendekatan keagenan menganggap kepemilikan manajerial sebagai sebuah instrument atau alat untuk mengurangi konflik keagenan. Kepemilikan saham manajerial akan menuntut manajer untuk selalu berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena hasil dari pengambilan keputusan tersebut akan memberikan dampak secara langsung terhadap saham yang dimiliki oleh manajer. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada saham perusahaan akan semakin baik pula kinerja perusahaan tersebut.

Penelitian oleh Herman (2016), menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. Chandradewi dan Sedana (2016), Putra dan Wirawati (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang positif terhadap ROA. Sianipar *et al.*, (2018) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Pihak manajemen yang memiliki saham dalam perusahaan cenderung menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Adestian (2015), serta hasil dari penelitian Puniayasa dan Triaryati (2016) menunjukkan bahwa, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemilikan manajerial dengan kinerja keuangan perusahaan diukur dengan (ROE). Hasil penelitian yang berbeda ditemukan Armini dan Wirama (2015), Suastini *et al.*, (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Merryana *et al.*, (2019), kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Proporsi kepemilikan manajerial yang terlalu kecil menyebabkan kinerja manajer kurang optimal dan manajer sebagai pemilik saham minoritas belum dapat berpartisipasi aktif dalam membuat suatu keputusan pada perusahaan, sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Biaya keagenan yang muncul akibat konflik keagenan dapat dikurangi dengan adanya kepemilikan institusional sebagai pengawas.

Kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer (Jensen and Meckling, 1976). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, karena dengan adanya kepemilikan institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut dapat menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikansi kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi yang cukup besar dalam pasar modal. Semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh institusi menyebabkan pengawasan yang dilakukan lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer. Maka kepemilikan institusional akan mendorong manajer untuk menunjukkan kinerja yang baik dihadapan para pemegang saham.

Penelitian Wiranata dan Yeterina (2013), Rifqi (2013) menunjukkan bahwa, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin rendah kinerja keuangan, dikarenakan kepemilikan institusional adalah pemilik sementara dan lebih memfokuskan laba jangka pendek. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari *et al.*, (2020) menunjukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap ROA, begitu juga dengan penelitian oleh Noviawan dan Septiani (2013) menunjukkan bahwa, kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Adanya investor institusional pada suatu perusahaan dipercaya dapat mengurangi

timbulnya *agency cost* yang terjadi akibat masalah keagenan antara manajer dan pemilik saham sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Chandradewi dan Sedana (2016), menyatakan bahwa jumlah kepemilikan saham oleh institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Pengawasan sangat penting keberadaannya dalam perusahaan agar setiap kegiatannya dapat diawasi dengan baik sehingga meminimalkan terjadinya konflik. Pengawasan sangat diperlukan pada perusahaan-perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia yang bermanfaat untuk mengetahui perkembangan kinerja perusahaan. Salah satu badan pengawas yang memiliki wewenang untuk mengawasi direksi adalah dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen dapat meningkatkan fungsi pengawasan pada perusahaan. Adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat mengurangi masalah keagenan dan mencegah terjadinya perilaku oportunistik. Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa, semakin banyak jumlah pemonitor, maka kemungkinan *agency cost*. Lemahnya pengawasan independen dan terlalu besarnya kekuasaan eksekutif merupakan penyebab tumbangannya perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Amien (2011) menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris maka semakin tinggi pula kinerja keuangan (ROA). Penelitian yang dilakukan oleh Yuni dan Nur (2015) yang menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap ROA. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Novitasari *et al.*, (2020), dewan komisaris

independen tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Hal ini disebabkan karena semakin banyak dewan komisaris maka akan semakin tinggi pula hubungan negatif antara ROA dan jumlah dewan komisaris. Hasil serupa juga ditemukan oleh Rimardhani *et al.*, (2016) yang menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap ROA.

Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang disebut *agency conflict*, berdasarkan teori keagenan. Para manajer seringkali mengabaikan kepentingan para pemegang saham karena pemegang saham perusahaan-perusahaan besar tersebar luas dan berada jauh dari perusahaannya. Kepemilikan manajer akan saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham diluar manajemen sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sebagai seorang pemilik (Jensen and Meckling, 1976). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi dan dewan komisaris terhadap ROE.

Kepemilikan manajerial merupakan pemilik perusahaan sekaligus menjadi pengelola perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka semakin kecil peluang terjadinya konflik, karena jika pemilik bertindak sebagai pengelola perusahaan maka dalam pengambilan keputusan akan sangat berhati-hati agar tidak merugikan perusahaan. Apabila kepemilikan manajerial kecil maka semakin sedikit

pula pemegang saham yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan, sehingga semakin tinggi munculnya masalah keagenan dikarenakan perbedaan kepentingan yang semakin besar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan disertai dengan begitu banyaknya ketidakkonsistenan yang ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan masih perlu untuk diteliti lebih lanjut, penelitian ini mencoba untuk menganalisa mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan, yang ditentukan dalam variabel mekanisme internal *corporate governance* diantaranya ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial. Peneliti ini menguji variabel *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan menggunakan rasio ROE (*Return On Equity*).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adapun rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah:

- 1) Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 2) Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 3) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja

keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

- 4) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 4) Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan, sehingga dapat digunakan sebagai referensi dan dasar penelitian-penelitian selanjutnya dalam teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa serta menambah pemahaman yang dapat dijadikan referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjut tentang masalah yang berkaitan dengan kinerja perusahaan dan dapat dijadikan sarana untuk mempraktekkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.

b) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atas penelitian yang dilakukan mahasiswa agar dapat dijadikan pertimbangan untuk kemajuan perusahaan.

c) Bagi Universitas Mahasaraswati

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi mahasiswa sebagai acuan atas penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang, dan dapat digunakan sebagai perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*agency theory*)

Perspektif *agency theory* merupakan salah satu teori yang berhubungan dengan *corporate governance* adalah teori keagenan (*agency theory*). Teori ini berisi tentang penjelasan mengenai hubungan antara *agent* (manajer) dan *principal* (pemilik) (Wijayanti dan Mutmainah, 2012). Dalam pelaksanaannya, pemilik akan memberikan wewenang kepada manajer dengan harapan agar manajer tersebut dapat memberikan yang terbaik untuk mencapai tujuan dari pemilik, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Namun timbul masalah dari adanya pemisahan kepemilikan dan pengelolaan yang disebut sebagai masalah agensi. Masalah agensi timbul akibat adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara pemilik (pemegang saham) dan agen (manajemen). Untuk mengurangi masalah atau konflik yang terjadi antara pemilik dan manajemen, maka diperlukan suatu mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Mekanisme yang dapat dipakai adalah GCG (*Good Corporate Governance*). GCG diharapkan dapat menjadi sistem yang memberikan petunjuk dan prinsip untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan manajer dan pemegang saham (El-Chaarani, 2014).

Laila (2011) menyatakan bahwa agensi teori muncul berdasarkan adanya fenomena pemisahan antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dengan para manajer yang mengelola perusahaan. Fakta empiris menunjukkan bahwa para manajer tidak selamanya bertindak sesuai dengan

kepentingan para pemilik perusahaan, melainkan sering kali terjadi bahwa para pengelola perusahaan (direksi dan manajer) bertindak mengejar kepentingan mereka sendiri.

Tujuan utama teori agensi adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian. Hubungan keagenan ini adalah terdapat pemisah antara kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan.

Permasalahan keagenan yang terjadi didalam perusahaan dapat diatasi dengan diterapkannya *good corporate governance* (GCG). GCG dalam hal ini berperan penting dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan kepatuhan atas berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi pemegang saham, GCG memberikan jaminan bahwa dana yang diinvestasikan pada perusahaan dikelola dengan baik dan akan memberikan *return* yang memadai.

Konflik kepentingan yang dikarenakan oleh kemungkinan agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal akan memicu terjadinya biaya yang disebut biaya keagenan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan biaya keagenan dalam tiga jenis yaitu:

- 1) Biaya monitoring pengeluaran biaya yang dirancang untuk mengawasi aktivitas - aktivitas yang dilakukan oleh agen.
- 2) Biaya bonding, biaya yang dikeluarkan untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan principal atau untuk meyakinkan

bahwa principal akan memberikan kompensasi jika manajemen benar-benar melakukan tindakan yang tepat.

- 3) Kerugian residual, jumlah kerugian yang dialami oleh prinsipal yang dikarenakan penyimpangan perilaku manajer.

Tujuan utama dengan adanya teori agensi tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak yaitu pemegang saham dan manajemen dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir biaya sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris. Teori agen juga berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang disebabkan karena pihak-pihak yang menjalin hubungan kerja sama dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda, yaitu *principal* yang menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya atas modal yang diinvestasikan, sedangkan *agent* menginginkan kepentingannya dapat terpenuhi dengan pemberian kompensasi, bonus atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan tanggung jawab dalam mengelola suatu perusahaan. *Agent* harus mengungkapkan informasi mengenai kinerja perusahaan yang telah dicapai oleh manajemen dalam bentuk laporan keuangan kepada pemilik agar tidak terjadi konflik. Hubungan *agency theory* dengan variabel penelitian ini yaitu, teori keagenan mengakibatkan hubungan yang asimetris antara pemilik dan pengelola, untuk konsep *good corporate governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan lebih sehat. Perusahaan yang memiliki *good corporate governance* atau sistem kelola yang baik, akan meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik, yang dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

2.1.2 Corporate Governance

Munculnya *corporate governance* disebabkan oleh adanya masalah keagenan antara pemilik modal dengan manajer, dimana pemilik kesulitan dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak menghasilkan *return*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi masalah keagenan antar pemilik dana dan manajer. Perusahaan *go public* membutuhkan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance*. *Good corporate governance* adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat, benar dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi keuangan kinerja perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, perusahaan publik harus memandang *good corporate governance* bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Sakaredi, 2011)

Menurut Tunggal (2013:467) *Corporate Governance* yaitu suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para *stakeholder* lainnya. *Forum Corporate Governance In Indonesia* (FCGI) mendefenisikan *corporate governance* sebagai perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham *stakeholder* serta para

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak - hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan arah strategi dan kinerja perusahaan, *corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan pengawasan terhadap manajemen agar manajemen bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan (Dewi dan Yasa, 2016)

Menurut Goodhart (2011), manfaat dan tujuan dari penerapan *good corporate governance* antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
- 2) Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.
- 3) Memaksimalkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan di mata *public* dalam jangka panjang.
- 4) Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisien serta meberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris direksi RUPS.
- 5) Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Menjaga *Going Concern* perusahaan.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua

jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Adapun prinsip-prinsip dari *good corporate governance* sebagai berikut:

- 1) Transparansi (*Transparency*) Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
- 3) Responsibilitas (*Responsibility*) Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan

usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) Independensi (*Independency*) untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran (*Fairness*) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Untuk menciptakan praktik *corporate governance* diperlukan mekanisme internal yang melibatkan organ-organ penting didalam perusahaan yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan serta melakukan tingkat pengawasan terhadap kinerja manajemen, agar manajemen bertindak sesuai dengan tujuan perusahaan dan berpengaruh nantinya terhadap peningkatan kinerja perusahaan, seperti melibatkan dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial yang dimana organ-organ tersebut memiliki tugas penting didalam menciptakan prinsip-prinsip *corporate governance*. Dewan komisaris dan dewan dewan direksi sangat penting bagi tata kelola perusahaan yang baik karena tanggungjawab utama mereka adalah untuk meyakinkan bahwa manajemen telah melakukan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan yang tepat, serta terlibatnya struktur kepemilikan dalam menerapkan *corporate governance* bertujuan agar pihak manajemen

bertindak atas kepentingan perusahaan tidak untuk kepentingan pribadi (Tunggal 2013:13).

2.1.3 Indikator Corporate Governance

1) Dewan Komisaris

Akuntabilitas dewan komisaris dari prinsip GCG harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, serta akuntabilitas dewan komisaris terhadap pemegang saham maupun perseroan dari perusahaan.

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara.

Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- 1) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- 2) Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan

baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.

- 3) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan yang terpenting dalam hal ini adalah kemandirian komisaris dalam pengertian bahwa dewan komisaris harus memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen, dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk mengambil keputusan, dan berpartisipasi secara aktif dalam penetapan agenda dan strategi. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggungjawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan

keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris di perbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris.

Adapun fungsi pengawasan dewan komisaris antara lain sebagai berikut:

- 1) Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam hal dewan komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab direksi. Kewenangan yang ada pada dewan komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat.
- 2) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, dewan komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan RUPS.
- 3) Dalam hal terjadi kekosongan dalam direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan

anggaran dasar, untuk sementara dewan komisaris dapat melaksanakan fungsi direksi.

- 4) Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.
- 5) Dewan komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka.
- 6) Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggungjawab (*acquitted decharge*) dari RUPS.
- 7) Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite disampaikan kepada dewan komisaris untuk memperoleh keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk komite audit, sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Adapun pertanggungjawaban dewan komisaris adalah sebagai berikut :

- 1) Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi. Laporan pengawasan dewan komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
- 2) Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota dewan komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota dewan komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.
- 3) Pertanggungjawaban dewan komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

2) Dewan Direksi

Dewan direksi adalah organ yang paling bertanggungjawab terhadap pengelolaan perusahaan. (Tunggal, 2013), artinya dewan direksi juga ikut mengawasi tindakan manajemen agar pengelolaan perusahaan berjalan dengan baik. Didalam menerapkan *corporate governance* dewan direksi harus bersikap profesional yaitu memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya, serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan dan

memastikan kesinambungan usaha perusahaan. Dewan direksi diharapkan melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional demi kepentingan perusahaan (Tunggal, 2013). Dewan direksi memiliki peran penting didalam. Kinerja keuangan perusahaan karena bertugas menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk memantau serta memastikan sistem pengendalian internal berjalan efektif, direksi melakukan langkah-langkah, antara lain:

- 1) Menugaskan para manajer dan staf yang bertanggung jawab dalam kegiatan atau fungsi tertentu untuk menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap kegiatan operasional serta kecukupan organisasi.
- 2) Melakukan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa para manajer dan pegawai telah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Mendokumentasikan dan mensosialisasikan struktur organisasi yang secara jelas menggambarkan jalur kewenangan dan tanggung jawab pelaporan serta menyelenggarakan suatu system komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang organisasi Bank.
- 4) Mengambil langkah – langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi, pengendalian intern telah dilaksanakan oleh manajer dan pegawai memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai.
- 5) Melaksanakan secara efektif langkah perbaikan atau rekomendasi dari auditor intern dan auditor ekstern, antara lain dengan cara menugaskan

pegawai yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja bank karena akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya.

3) Kepemilikan Institusional

Menurut Nuraina (2012:116) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga seperti perusahaan yang diukur dengan persentase yang dihitung pada akhir tahun. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitoring dan mengontrol manajemen. Tingkat pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen dan kepemilikan institusional tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.

Bushee (1998) mengatakan kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan *discretionary* dalam laporan keuangan sehingga memberikan kualitas laba yang dilaporkan. Menurut Crutclley *et al.*, (1999) semakin tinggi kepemilikan institusional semakin kuat kontrol eksternal terhadap perusahaan dan mengurangi *agency cost*, sehingga perusahaan akan menggunakan deviden yang rendah. Dengan adanya *control* yang ketat akan menyebabkan manajer

menggunakan utang pada tingkat yang rendah untuk mengatisipasi kemungkinan terjadinya *financial distress* dan resiko kebangkrutan.

4) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah perwujudan dari prinsip transparansi dari GCG. Dalam mengelola perusahaan manajemen harus transparan agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan pemegang saham sebagai pemilik. Menurut Mehran dan Adams (2003) mengartikan kepemilikan manajerial sebagai proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham. Sementara manajer yang tidak memiliki saham perusahaan, ada kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

Menurut Iskandar dan Chamlou (2000) menyatakan bahwa salah satu elemen *corporate governance* yang penting adalah transparansi (*transparency*) atau keterbukaan. Keterbukaan adalah suatu tindakan untuk menjelaskan segala sesuatu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan kepada publik. Keterbukaan tidak mudah dilakukan jika manajemen memiliki kepentingan dan informasi privat yang mendukung kepentingannya. Kondisi seperti ini dapat terjadi jika dalam perusahaan terdapat manajemen yang memiliki bagian sebagai pemilik (*managerial ownership*). Semakin besar persentase kepemilikan manajerial, maka kemungkinan untuk melakukan keterbukaan semakin kecil, sehingga perusahaan akan lebih memiliki risiko.

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai

pemegang saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan *agency theory*. Dalam kerangka *agency theory*, hubungan antara manajer dan pemegang saham digambarkan sebagai hubungan antara *agent* dan *principal*. *Agent* diberi mandat oleh *principal* untuk menjalankan bisnis demi kepentingan *principal*. Manajer sebagai *agent* dan pemegang saham sebagai *principal*. Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk memaksimalkan sumber daya (*utilitas*) perusahaan. Suatu ancaman bagi pemegang saham jikalau manajer bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang saham. Dalam konteks ini masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Inilah yang menjadi masalah dasar dalam *agency theory* yaitu adanya konflik kepentingan. Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan untuk memaksimalkan tujuannya. Masing-masing pihak memiliki risiko terkait dengan fungsinya, manajer memiliki risiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang saham memiliki risiko kehilangan modalnya jika salah memilih manajer. Kondisi ini merupakan konsekuensi adanya pemisahan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan.

Situasi tersebut di atas tentunya akan berbeda, jika kondisi manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham atau pemegang saham juga sekaligus

manajer atau disebut juga kondisi perusahaan dengan kepemilikan manajerial. Keputusan dan aktivitas di perusahaan dengan kepemilikan manajerial tentu akan berbeda dengan perusahaan tanpa kepemilikan manajerial. Dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang saham tentunya akan menselaraskan kepentingannya dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara dalam perusahaan tanpa kepemilikan manajerial, manajer yang bukan pemegang saham kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa *agency cost* akan rendah di dalam perusahaan dengan kepemilikan manajerial (*managerial ownership*) yang tinggi, karena hal ini memungkinkan adanya penyatuan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajer yang dalam hal ini berfungsi sebagai *agent* dan sekaligus sebagai *principal*.

Jensen & Meckling (1976) juga menganalisis bagaimana nilai perusahaan dipengaruhi oleh distribusi kepemilikan antara pihak manajer yang menikmati manfaat dari pihak luar dan yang tidak menikmati manfaat. Dalam kerangka ini, peningkatan kepemilikan manajemen akan mengurangi *agency difficulties* (kesulitan agen) melalui pengurangan insentif bagi pemegang saham dan mengambil alih kekayaan pemegang saham. Hal ini sangat potensial dalam mengurangi alokasi sumber daya yang tidak menguntungkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.4 Kinerja Keuangan

Menurut Hanafi (2013) Kinerja merupakan suatu usaha yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari

aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Dikatakan efektifitas apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal. Menurut Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Dewi dan Yasa, 2016).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan seperti dikuti oleh Yuniarti (2014) yaitu :

1) Dukungan Organisasi

Pengorganisasian dimaksudkan untuk membagi tugas pokok pencapaian perusahaan menjadi tugas pokok beberapa unit organisasi secara seimbang, serta memberikan kejelasan bagi setiap unit tentang tugas pokok dan sasaran yang harus dicapai oleh masing-masing unit tersebut.

2) Fungsi Manajemen

Manajemen adalah suatu proses mengkombinasikan dan mendayagunakan semua sumber-sumber secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan.

Untuk itu, manajemen melaksanakan fungsi-fungsi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian dan pengawasan. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan rasio keuangan. Setiap rasio keuangan memiliki tujuan, kegunaan, dan arti tertentu. Rasio keuangan digunakan untuk membandingkan risiko dan tingkat imbal hasil dan berbagai perusahaan untuk membantu investor dan kreditor membuat keputusan investasi dan kredit yang baik. Agar dapat mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya. Analisis keuangan perlu melakukan pemeriksaan atas berbagai aspek kesehatan keuangan perusahaan.

Pada penelitian ini komponen yang menjadi fokus dalam penilaian kinerja keuangan adalah rasio dari profitabilitas yang diwakili oleh *Return On Equity* (ROE), seberapa efektif keberadaan mekanisme internal perusahaan berpengaruh nantinya terhadap bagaimana manajemen mengelola modal didalam perusahaan sehingga dapat meningkatkan ROE.

Menurut Kasmir (2012:204) *Return On Equity* adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Sehingga *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Apabila terjadi kenaikan dalam rasio ROE, berarti terjadi kenaikan laba bersih dari perusahaan yang bersangkutan. Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan mempunyai kinerja manajemen semakin baik sehingga laba bersih dapat meningkat. *Return on Equity* (ROE) menunjukkan kemampuan manajemen dalam memaksimalkan tingkat pengembalian kepada pemegang saham atas setiap modal yang digunakan oleh perusahaan. Dengan demikian nilai ROE yang tinggi berarti terjadi kenaikan laba bersih sehingga akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya (Puniyasa dan Triaryati, 2016).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian tentang penerapan *Corporate Governance*, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama, Tahun, Judul	Variabel					Hasil Penelitian
		X1	X2	X3	X4	Y	
1.	Amien (2011) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI.	✓		✓	✓	✓	1. Dewan Komisaris mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 2. Kepemilikan Manajerial mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

							3. Kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh positif dan signifikan Terhadap Kinerja Keuangan.
2.	Putra dan Wirawati (2013) Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Hubungan Antara Kinerja Keuangan dengan Nilai Perusahaan.				✓		1. Kepemilikan Manajerial mampu mempengaruhi hubungan antara kinerja (ROA) dengan nilai perusahaan.
3.	Wiranata dan Yeterina (2013) Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia			✓	✓		1. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 2. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
4.	Rifqi (2013) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012	✓		✓		✓	1. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 2. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
5.	Noviawan dan Septiani (2013) Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan	✓		✓	✓	✓	1. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan . 2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. 3. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan.

6.	Adestian (2014) Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi , Dewan Komisaris Independent , Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Pada Kinerja Perusahaan Perbankan Yang Listing Di Bei Pada Tahun 2012-2014	✓					1. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
7.	Yuni dan Nur (2015) Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan : <i>Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Variabel Intervening	✓		✓	✓	✓	1. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
8.	Armini dan Wirama (2015) Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Dividen Pada Kinerja Perusahaan.			✓			1. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan.
9.	Sianipar <i>et al.</i> , (2015) Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen Terhadap <i>Return On Asset (ROA)</i> (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Perkebunan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015).	✓		✓	✓		1. Dewan Komisaris Independen memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 2. Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. 3. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang positif terhadap dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

10.	Rimardhani <i>et al</i> (2016) Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2014).	✓		✓			1. Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.
11.	Herman (216) Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, <i>Leverage</i> , dan <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Perusahaan. (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Masuk ke dalam Indeks LQ 45 pada Tahun 2011-2014).			✓	✓		1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja perusahaan. 2. Kepemilikan institusional tidak dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
12.	Chandradewi dan Sedana (2016) Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Return On Asset</i> .	✓		✓	✓		1. Dewan komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROE. 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. 3. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.
13	Puniyasa dan Triaryati (2016) Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Struktur Kepemilikan dan Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang Masuk dalam Indeks CGPI			✓	✓	✓	1. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE). 2. Kepemilikan Institusional tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap

							kinerja keuangan perusahaan (ROE)
14.	Suastini <i>et al.</i> , (2016) Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur di BEI (Struktur Modal Sebagai Variabel Moderasi).			✓			1. Kepemilikan manajerial berpengaruh negative dan signifikan terhadap nilai perusahaan.
15.	Merryana <i>et al.</i> , (2019) <i>Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia.</i>	✓		✓	✓		1. Dewan Komisaris independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan. 3. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan.
16.	Novitasari <i>et al.</i> , (2020) Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI.</i>	✓		✓	✓	✓	1. Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 3. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.